

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- A. Mukhtie Fadjar, 2013, *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Arifin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, PT Raja Grafindo, Depok.
- Harjono, 2008 *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali pers, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhadam Labolo, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, Mataram.

Muhammad Erfa Redhani, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus*, Bratagama Publisher, Wonogiri.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Prenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Kencana, Jakarta.

Tim Penyusun Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.

Titiek Kartika, 2016, *Penyelesaian Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015 "Suatu Catatan Pengetahuan Tentang Demokrasi di Daerah"*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Yudi Suparyanto, 2007, *Demokrasi di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten.

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

C. Jurnal, Skripsi, Makalah

- Achmad Djunaidi Anasurillah, dan Candra, *“Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No.100/PUUXIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia”*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Agus Riyanto, *“Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah”*, Jurnal Sprektum, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Ajie Ramdan, *“Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, 2014.
- Alan Darusman, *“Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang”* Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Andika Muhammad Arifin Mooduto dan Uu Nurul Huda, *“Urgensi Keberadaan Lembaga PemantauPemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong”* Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Arwi Aqif, *“Legal Standing PemantauPemilu Sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, 2016.
- Bambang Sutiyoso, *“Problematika Pengajuan Permohonan Di Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 13, 2021.
- Dwi Putra Nugraha, *“Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia”*, Jurnal Law Review, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Elfahmi Lubis dan Nedyanto Ramadhan, *“Varian model Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Kerangka Regulatif”*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Engga Rahmat dan Sunny Ummul Firdaus, *“Analisi Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepesertaan Calon Tunggal”*, Jurnal Res Publica, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Ifan Nur Rahman, Et. Al., *“Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, 2011.

Indra Fajrul Falah., *“Hak Gugat Pemilih dan Masyarakat Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal”*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 11, No. 2, 2018.

Marsel Jerolson Samuel Mandak, *“Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Di Mahkamah Konstitusi”*, Lex et Societatis, Vol.3, No. 3, 2015.

Maryam Nur Hidayati, *“Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”*, Jurnal Renaissance, Vol. 1, No. 1, 2016.

Rahmanto. Tony Yuri, *“Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten”*, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 2, 2018.

D. Website

MKRI.id, *“Ketua MK: Pilkada Merupakan Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dan Nomokrasi”*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16823>

MKRI.id, *“Sidang PHP Kada Jabar, Calon Tunggal Bupati Tasikmalaya Digugat Pemantau”*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12693>

RumahPemilu.org, *“Menakar Calon Tunggal”*
<https://rumahPemilu.org/menakar-calon-tunggal/>

RumahPemilu.org, *“Pilkada Bagian Rezim Pemilu”*,
<https://rumahPemilu.org/putusan-mk-no+55-2019-Pilkada-bagian-rezim-Pemilu/>

